

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir tahun 2010 hingga awal 2011, kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah tengah dilanda pergolakan politik yang sifatnya masif. Pergolakan ini dimotori oleh sekelompok orang yang menginginkan revolusi akibat kejenuhan politik yang mereka alami selama ini di negara mereka masing-masing. Sebut saja Tunisia, di mana pergolakan politik ini mulai muncul ke permukaan, kemudian diikuti oleh Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya, dan juga Mesir. Tujuan mereka sama, yaitu menginginkan revolusi yang tujuannya untuk menumbangkan rezim yang sedang berkuasa. (Ncube & Anyanwu, 2012)

Peristiwa ini disambut baik oleh Amerika Serikat. Telah kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat adalah negara yang selama ini konsisten mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia. Lebih jauh lagi pada Juli 2011, Obama dalam pidatonya di Gedung Putih menegaskan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Timur Tengah dan Afrika Utara adalah penyebaran nilai-nilai HAM dan demokrasi. (Office of the Press Secretary, 2011)

Salah satu negara yang juga ikut mengalami peristiwa ini adalah Mesir. Amerika Serikat memiliki hubungan yang baik dengan Mesir sejak masa Anwar Sadat hingga Era Husni Mubarak. Bantuan ekonomi cukup sering di berikan oleh Amerika Serikat terhadap pemerintah Mesir. Hal ini berdasarkan pada perjanjian Camp David, dimana Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk memberikan

bantuan kepada Mesir. Sebagai timbal baliknya Mesir akan memberikan akses bagi Amerika Serikat untuk memanfaatkan Terusan Suez untuk keperluan militer ataupun hal lain yang terkait.(Elzy, 2013)

Selain menjadikan Mesir sebagai sekutu di timur tengah, Amerika Serikat juga secara konsisten menyebarkan nilai-nilai Demokrasi untuk menjaga perdamaian. Semakin banyak negara dengan paham Demokrasi, maka kemungkinan terjadinya perang akan semakin sedikit. Hal ini sejalan dengan *Democratic Peace theory*. Amerika Serikat secara sadar melakukan hal ini bukan hanya untuk keadamaian dunia, namun juga trauma atas kejadian 11 September sangat tertanam dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan Semakin banyaknya negara dengan Paham demokrasi, Maka Amerika Serikat secara tidak langsung menjaga keamanan negaranya.

Jatuhnya kekuasaan Husni Mubarak diharapkan menjadi awal terbentuknya demokrasi yang baik di Mesir. Presiden Mesir yang baru dilantik Dr. Mohammad Morsi diharapkan mampu menjalankan amanat rakyat yang telah dipercayakan melalui pemilihan umum yang dimenangkannya. Revolusi Mesir juga bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain yang masih memiliki persoalan dalam penegakan demokrasi dan hak asasi manusia.

Amerika Serikat mendukung pemerintahan Mohammad Morsi. Hal ini terwujud karena sikap Morsi yang sepertinya serius untuk membuka ruang bagi demokrasi yang lebih baik. Di mana baru tiga hari terpilih sebagai presiden Mesir, Ia menyatakan berniat menunjuk seorang perempuan sebagai salah satu wakil

presidennya. Juga, dia mengangkat seorang penganut Kristen Koptik dan wakil dari kelompok liberal untuk melengkapi posisi wakil presiden lainnya.

Wacana ini tentu sebuah kemajuan, apalagi Mesir merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selanjutnya sikap yang diambil Morsi juga menunjukkan bagaimana peran perempuan, kelompok liberal tidak dijadikan sebagai musuh atau sebatas saingan politik tetapi juga bisa dijadikan mitra pembangunan. Demokrasi Mesir adalah sebuah media promosi demokrasi dan penegakan HAM. Hal ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Obama terhadap Timur Tengah dan Arika Utara.(Office of the Press Secretary, 2011)

Hubungan militer kedua negara sangatlah dekat. Kebijakan Fiskal Amerika Serikat disetujui oleh Kongres. Bantuan militer sebesar USD1,3 miliar dan bantuan ekonomi sebesar USD250 Juta pada tahun 2012.(Sharp, 2015, hal. 16) Namun, Mesir harus memenuhi beberapa syarat salah satunya adalah menjaga kesinambungan hubungan strategis dengan Amerika Serikat sebagai mana tercantum dalam perjanjian damai Mesir-Israel 1979. Hal ini bertentangan dengan kebijakan luar negeri baru yang ingin diwujudkan oleh Morsi untuk mewujudkan Mesir sebagai negara yang mandiri dan terlepas dari bayang-bayang Amerika Serikat dan meminta pembahasan ulang mengenai isi perjanjian Camp David.

Krisis internal Suriah dan konflik Hamas-Israel membawa Amerika Serikat dan Mesir lebih dekat kedua negara memiliki pendirian yang sama atas kedua isu. Mesir bersama-sama dengan Amerika Serikat mengupayakan penegakan Hak Asasi Manusi (HAM) di Suriah. Namun terkait Hamas-Istrael, Mesir mengambil

sikap sebagai mediator. Artinya Mesir tidak menunjukkan keberpihakan terhadap Palestina, di mana Amerika Serikat sangat melindungi Israel.(Office of the Press Secretary, 2012).

Namun sebagai pemerintahan yang baru,pemerintahan Morsi tentu saja tidak serta-merta stabil. Mesir masih tetap bergantung pada bantuan Amerika Serikat untuk memenuhi kebutuhannya anggaran belanja negara. Pada bulan September 2012, Pemerintahan Obama memberikan tawaranpenambahan USD 450 Juta, Namun Kay Granger anggota Kongres dari Partai Republikan, kepala Subkomite Operasi Luar Negeri Kongres Amerika Serikat menolak permintaan pemerintah Obama..(Ottaway D. B., 2012, hal. 3) Membuat mesir kehilangan bantuan dan pada akhirnya berujung pada kejatuhan Morsi dari jabatannya sebagai Presiden Mesir.Selain itu pada satu kesempatan, Obama mengungkapkan bahwa Mesir sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai sekutu non-NATO bagi Amerika Serikat.(Ottaway D. B., 2012, hal. 2)

Jatuhnya Mohammad Morsi menghadirkann sebuah paradox yang unik. Awalnya Amerika Serikat mendukung pemerintahan Morsi berbalik arah dengan menghentikan bantuan terhadap Mesir disaat Morsi membutuhkan dana dalam menghadapi Krisis. Bahkan dengan beberapa kontribusi Morsi atas kepentingan Amerika Serikat dalam beberapa isu Internasional, Amerika Serikat tidak menunjukkan usaha atau setidaknya ketidak nyamanan ketika Morsi dilengserkan oleh militer Mesir.

B. Rumusan Masalah

Mengapa Amerika Serikat tidak mendukung Mohammad Morsi sebagai Presiden Mesir?

C. Kerangka Konseptual

Konsep Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin.

Politik Luar Negeri

Politik luar negeri secara ringkas dapat diartikan sebagai wacana suatu negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan guna merespon kondisi internasional maupun tindakan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam perkembangannya, para ilmuwan ilmu Hubungan Internasional kemudian melakukan kajian mendalam terhadap proses penetapan politik luar negeri. Konsekuensinya, terdapat banyak perbedaan perumusan proses penetapan politik luar negeri antara satu ilmuwan dengan yang lainnya. Hugh Gibson dalam bukunya, *The Road to Foreign Policy*, mendefinisikan politik luar negeri sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain. (Gibson, 1984, hal. 31) Adapun Marijke Breuning dalam *Foreign Policy Analysis* mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sebuah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap interaksinya dengan lingkungan internasional. (Breuning, 2007, hal. 151)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, politik luar negeri secara ringkas dapat diartikan sebagai wacana suatu negara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan guna merespon kondisi internasional maupun tindakan negara lain untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam perkembangannya, para ilmuwan ilmu Hubungan Internasional kemudian melakukan kajian mendalam terhadap proses penetapan politik luar negeri.

Dalam aspek yang lebih dinamis, politik luar negeri adalah suatu tindakan pemerintah terhadap pemerintah lain atau negara terhadap negara lain, termasuk juga keseluruhan hubungan luar negeri dengan beragam bentuk tujuan dan kepentingan. Esensi dari politik luar negeri menurut Hans Morgenthau adalah kepentingan nasional. Maksudnya adalah politik luar negeri merupakan hasil dan bagian dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional negara tersebut atau singkatnya politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan politik domestik negara tersebut.

Politik luar negeri adalah: *"A strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed at achieving specific goal defined in terms of national interest"*. (sebuah strategi atau program yang direncanakan oleh para pembuat keputusan suatu negara terhadap negara lain atau badan internasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu didefinisikan dalam istilah kepentingan nasional).(Plano & Olton, 1978, hal. 127)

Ditulisakan sebelumnya bahwa politik luar negeri merupakan manifestasi utama dari perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain, sehingga yang terjadi adalah adanya interaksi negara-negara. Interaksi antarnegara itu dapat berlangsung dalam sistem internasional, di mana ternyata negara masih merupakan aktor utama dalam hubungan internasional tadi. Maka dengan demikian hubungan internasional merupakan forum dari kepentingan-kepentingan nasional dari aktor-aktor tadi. Dalam interaksi tersebut setiap negara berusaha menegakkan dan mempertahankan kepentingan nasionalnya melalui kebijakan politik luar negeri masing-masing.

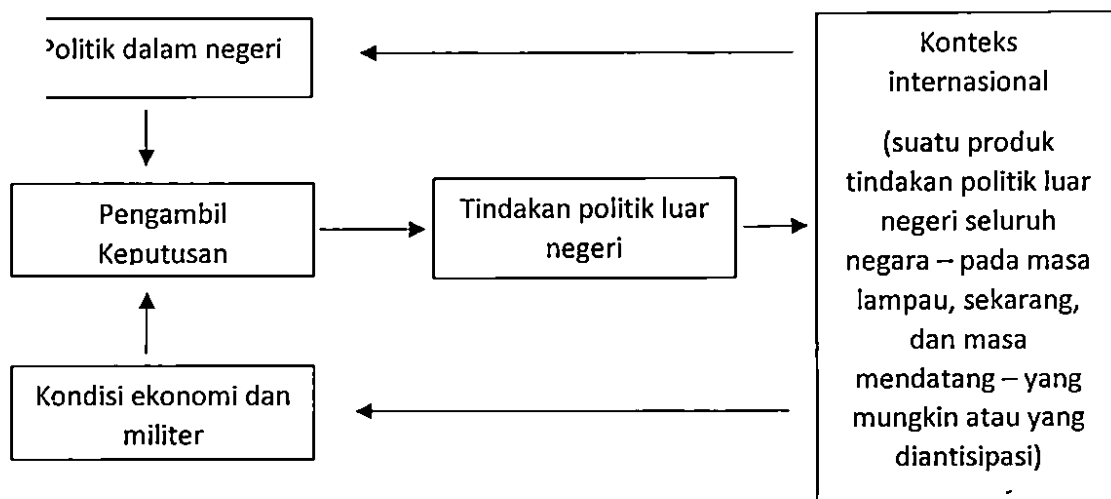
Negara dalam konteks diatas dipandang sebagai aktor yang memiliki tujuan dan kekuasaan yang bersifat otonom. negara merupakan unit dasar dalam politik luar negeri dari berbagai negara yang mana akan membentuk pola perilaku yang mencerminkan konektivitasnya dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijaksanaan luar negerinya yang diartikulasikan oleh pemerintah dengan segala konsekuensinya.

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar negeri dari William D. Coplin. Coplin menjelaskan bahwa dalam mengambil sebuah kebijakan, ada empat determinan yang mempengaruhi kebijakkan tersebut. Yaitu konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, politik dalam negeri, serta prilaku pengambil keputusan.(Coplin, 1992, hal. 165) Konteks internasional menurut Coplin ialah posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain.(Coplin, 1992, hal. 166) Sedangkan kondisi ekonomi dan militer serta politik

domestik merupakan determinan yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dalam menetapkan politik luar negeri. Hubungan keempat determinan tersebut dalam penetapan politik luar negeri dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 1.1

Proses Politik Luar Negeri(Coplin, 1992)



Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa determinan konteks internasional, politik dalam negeri, serta kondisi ekonomi dan militer berpengaruh terhadap perilaku pengambil keputusan dalam menentukan tindakan politik luar negeri negara yang dipimpinnya. Persepsi pengambil keputusan sendiri tidak dapat dilepaskan dari realitas masa lalu, masa kini, dan realitas yang diharapkan di masa depan.(Mas' oed, 1991, hal. 20)

Berdasar pada bagan di atas, dapat diketahui bahwa perilaku pengambil kebijakan dipengaruhi oleh konteks internasional, kondisi ekonomi dan militer, serta politik domestik. Konteks internasional atas merupakan suatu produk

tindakan politik luar negeri seluruh negara pada masa lampau, sekarang dan masa mendatang yang mungkin terjadi atau yang harus diantisipasi. Kondisi ekonomi dan militer adalah suatu determinan yang menjelaskan kapasitas ekonomi atau militer yang berkaitan antara subjek dan objek sehingga dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Politik Domestik adalah sebuah determinan yang menjelaskan tentang situasi politik domestik serta pengaruh-pengaruh yang melatar belakangi sebuah kebijakan luar negeri di buat. Dalam hal ini termasuk presiden sebagai pengambil kebijakan.

Telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa dari segi Politik dalam Negeri, para politisi Amerika Serikat sedikit banyak mendengarkan tuntutan dari Israel. Israel sadar betul bahwa selain Amerika Serikat, yang bisa melindunginya di Timur Tengah adalah Mesir. Pada masa transisi demokrasi di Mesir, Kongres memutuskan untuk menunda pengiriman 10 helikopter jenis Apache untuk Mesir. Namun, hal itu tidak disetujui oleh Israel dan meminta Kongres untuk melanjutkan pengiriman bantuan alutsista tersebut kepada Mesir. Hal diatas membuktikan bahwa pengambilan keputusan domestik Amerika Serikat terkait Mesir sangat dipengaruhi oleh kepentingan Israel.(Choirul, 2013)

Dari determinan ekonomi dan militer, Amerika Serikat memiliki kedekatan yang sangat baik dengan Mesir, hal ini terwujud dalam bantuan yang secara konsisten diberikan oleh Amerika Serikat kepada Mesir. Amerika Serikat juga mensponsori pendidikan militer bagi perwira Mesir di Amerika Serikat. Hal ini

telah dilakukan oleh Amerika Serikat sejak 1979 setelah kesepakatan Perjanjian Camp David.

Namun Ikhwanul Muslim sebagai partai penguasa di Mesir Menganggap perjanjian Camp David Perlu di Revisi karena banyak merugikan Mesir. Dari segi kedaulatan geografis dan militer. Hal ini membuat Israel merasa terancam. Amerika Serikat melihat manufer ini sebagai manufer yang berbahaya karena bisa mengancam stabilitas keamanan di Timur Tengah.

Dalam konteks internasional, Amerika Serikat sangat mendukung demokratisasi yang terjadi di Mesir karena sesuai dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah dan Afrika Utara yaitu penyebaran nilai-nilai Universal HAM dan Demokrasi. Namun sikap Amerika Serikat berubah setelah Morsi mengeluarkan dekrit untuk mengganti konstitusi Mesir dengan corak negara Islam.

Obama juga menganggap Mesir dimasa pemerintahan Morsi tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi sekutu non-NATO Amerika Serikat. Hal ini terjadi setelah demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di depan kedutaan besar Amerika Serikat di Kairo. Walaupun tidak ada korban jiwa baik dari pihak Ikhwanul Muslimin maupun Warga Amerika Serikat pada saat itu. (Ottaway D. B., 2012, hal. 2)

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka konseptual yang sudah penulis sebutkan, juga beberapa fakta mengenai hubungan Amerika Serikat-Mesir yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Maka penulis dapat mengambil hipotesa mengapa Amerika Serikat mengambil kebijakan untuk tidak mendukung Morsi :

Karena Mohammad Morsi sebagai Presiden Mesir dan Ikhwanul Muslimin Sebagai partai pengusungnya menunjukkan indikasi-indikasi perubahan kebijakan politik yang mengancam kepentingan luar negeri Amerika Serikat pada khususnya dan Timur Tengah pada umumnya.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menerapkan pola pengolahan data yang diperoleh dari berbagai literatur, media massa, data-data dari website, serta dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dan mendukung permasalahan yang ada. Teknis analisis data yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Disamping itu dalam skripsi ini juga menggunakan metode deduksi, yakni penggunaan teori sebagai landasan analisa untuk memperoleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup serta batasan waktu. Hal ini dilakukan untuk membuat tulisan yang fokus dan terarah. Sesuai dengan

judul yang penulis telah ajukan. Fokus tulisan ini adalah pada Amerika Serikat dalam kebijakannya terhadap pemerintahan Morsi. Rangkaian peristiwa turunya Mohammad Morsi sejak 2011. Namun tidak menutup kemungkinan untuk sedikit membahas beberapa kebijakan sebelum dan sesudah turunya Morsi untuk memperkuat data jika dirasa perlu.

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan Bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur metodologis karya ilmiah yang meliputi; Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Bab ini berisi gambaran umum mengenai karakteristik Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang terbagi dalam beberapa sub yaitu: tujuan dasar, prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Amerika Serikat, serta aktor-aktor penting dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat.

Bab III: Bab Ini menjelaskan Kebijakan-kebijakan yang telah ambil oleh Amerika Serikat terhadap Mesir di Era Morsi. Bab ini juga berisi tentang kondisi sejarah kerjasama militer Amerika Serikat-Mesir. Juga kedekatan Amerika Serikat dan Mesir di Era Morsi.

Bab IV: Dalam Bab ini, Penulis akan menuliskan tentang perubahan kebijakan Amerika Serikat terhadap Morsi, termasuk tawaran-tawaran Amerika Serikat kepada Morsi untuk mengakhiri krisis yang terjadi di Mesir. Kemudian menganalisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

untuk tidak mempertahankan Morsi sebagai Presiden walaupun terpilih secara demokratis.

Bab V : Penulis akan memberikan kesimpulan dari bab-bab yang dibahas sebelumnya.